

Kebijakan Pemerintah Desa Guna Membangun Pariwisata Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Masyarakat Di Desa Kuranji Dalang Kab. Lombok Barat

Nurmalasari¹, Ilham Zitri², Yudhi Lestanata³

^{1,2,3} Universitas Muhammadiyah Mataram

Corresponding Author: Nurmalasarisape44@gmail.com

Keyword:
Kebijakan;
Pariwisata;
Ekonomi;
Masyarakat

Abstract: *This study aims to analyze the policies of the Kuranji Dalang Village government in developing the tourism sector and to examine the extent to which these policies are able to integrate local potential with sustainable village development planning. This study uses a qualitative approach with a case study method. Data was obtained through in-depth interviews, observation, and documentation involving village officials, community leaders, and local residents. Data analysis was conducted through the stages of data reduction, data presentation, and interactive conclusion drawing. The results of the study show that Kuranji Dalang Village has considerable potential for marine tourism, particularly in the coastal area, which has a direct economic impact on the community through fishing and small businesses such as food and beverage sales. However, the village government does not yet have a specific vision and mission formally directed at tourism development, so existing policies are still general and unstructured. Tourism development is more focused on basic infrastructure development and the formation of community groups such as Pokdarwis and MSMEs, which indicates efforts towards a community-based tourism approach. The main obstacles faced include budget constraints, weak coordination, low community participation in village deliberations, and a lack of regulations related to visitor safety and supervision. Nevertheless, the level of community trust in the village government is relatively high, which is an important social capital in sustainable tourism development. This study concludes that tourism development in Kuranji Dalang Village requires strengthening more targeted village policies, increasing institutional capacity, and active community participation so that tourism can develop inclusively and sustainably in accordance with the principles of sustainable tourism.*

PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan salah satu sektor strategis yang mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi, baik pada tingkat nasional maupun lokal. Di tingkat desa, Yoeti (2016) pariwisata tidak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan dan rekreasi, tetapi juga menjadi motor penggerak peningkatan pendapatan masyarakat melalui pengelolaan potensi alam, budaya, dan sosial yang dimiliki desa tersebut. Potensi desa seperti keindahan alam, seni budaya, tradisi lokal, maupun produk kerajinan rakyat memiliki nilai ekonomi tinggi apabila dapat dikelola secara optimal dengan dukungan kebijakan pemerintah desa. (Putra, 2019) Pariwisata pada era globalisasi saat ini telah menjadi salah satu sektor strategis yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat (SNKI, 2021). Di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, pariwisata bahkan diposisikan sebagai leading sector yang memiliki efek ganda (multiplier effect) terhadap sektor-sektor lain, seperti transportasi, perdagangan, seni budaya, maupun industri kreatif. (Suwanto, 2019).

Namun, dalam praktiknya, pengembangan pariwisata desa sering menghadapi berbagai masalah. Pertama, masih banyak desa yang belum memiliki kebijakan strategis dan terarah untuk mengelola potensi pariwisata yang ada. Kurangnya perencanaan yang matang menyebabkan potensi wisata desa sering tidak tergarap dengan baik atau bahkan ditinggalkan (Adisasmita, 2006). Kedua, keterbatasan sumber daya manusia dan minimnya akses terhadap pelatihan

pariwisata membuat masyarakat desa kesulitan beradaptasi dengan tuntutan industri pariwisata yang semakin kompetitif (Bertacchini et al., 2024). Oleh sebab itu, kebijakan pemerintah desa dalam mengembangkan pariwisata menjadi isu penting dan strategis yang patut diteliti secara mendalam. (Nugroho, 2018)

Selain itu, masalah infrastruktur juga menjadi hambatan besar. Banyak desa wisata yang memiliki daya tarik unik, namun akses jalan, transportasi, maupun fasilitas pendukung pariwisata masih belum memadai. Hal ini berdampak pada rendahnya minat wisatawan untuk berkunjung. Belum lagi, promosi wisata desa juga sering kurang diperhatikan, sehingga keberadaan destinasi wisata desa tidak banyak dikenal oleh masyarakat luas, baik nasional maupun internasional. (Hadiwijoyo, 2012).

Dalam konteks pembangunan daerah, desa memegang peranan penting karena desa merupakan unit pemerintahan terdepan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Desa tidak hanya berfungsi sebagai penyedia sumber daya alam dan manusia, tetapi juga memiliki potensi pariwisata yang unik, autentik, dan berbasis kearifan lokal. Kebijakan desa dalam bidang pariwisata sesungguhnya tidak dapat dilepaskan dari adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan otonomi lebih luas kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri (Munif et al., 2009). Melalui regulasi ini, desa memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya lokal, termasuk dalam bidang pariwisata, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya dana desa yang dialokasikan setiap tahun, pemerintah desa memiliki modal finansial untuk mengembangkan sektor pariwisata melalui pembangunan infrastruktur pendukung, promosi destinasi, maupun penguatan kapasitas masyarakat sebagai pelaku pariwisata.

Namun, pengembangan pariwisata desa bukan tanpa tantangan. Desa kurangi juga memiliki potensi wisata tetapi masyarakat setempat belum mampu mengelolanya secara profesional dan berkelanjutan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan sumber daya manusia, minimnya akses terhadap pasar, lemahnya kelembagaan, serta kurangnya inovasi dalam pengelolaan destinasi (Suntono, 2019). Di sisi lain, masih ditemukan kebijakan desa yang cenderung bersifat jangka pendek dan berorientasi pada pembangunan fisik, tanpa mempertimbangkan aspek keberlanjutan sosial, budaya, maupun lingkungan. Kondisi ini menjadikan sektor pariwisata desa sering kali belum optimal dalam memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat.

Teori yang digunakan dalam kebijakan pemerintah dalam mengembangkan pariwisata yaitu dengan menggunakan teori Pariwisata Berkelanjutan (Sustainable Tourism). Teori ini bertujuan untuk mengembangkan pariwisata yang menjamin keberlangsungan sumber daya alam, ekonomi, dan kearifan lokal, serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan. Penerapannya melibatkan peningkatan infrastruktur ramah lingkungan, pengelolaan destinasi yang berkelanjutan, dan peningkatan kesadaran masyarakat. Kontribusi yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

Dilihat dari bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah desa tersebut, sehingga artikel ini ditulis dengan tujuan guna untuk mengetahui bagaimana kebijakan desa dalam pariwisata untuk melihat sejauh mana pemerintah desa mampu mengintegrasikan perencanaan pembangunan desa dengan potensi pariwisata yang dimiliki. Banyak desa wisata yang berkembang tanpa perencanaan matang, sehingga berisiko mengalami stagnasi atau bahkan kerusakan lingkungan (Zitri, 2022). Oleh karena itu, studi ini relevan untuk memberikan gambaran apakah kebijakan desa sudah mengarah pada perencanaan jangka panjang yang berkelanjutan, atau masih bersifat sporadis dan reaktif. Karena Semua mekanisme ini hanya dapat berjalan efektif apabila didukung oleh kebijakan desa yang tepat, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

METODE

Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan bentuk deskriptif, dimana peneliti dalam mengumpulkan data yang diperoleh dari cara pandang subjek penelitian terhadap realitas yang mereka alami, yaitu berdasarkan pandangan sumber data, bukan pandangan peneliti (Sugiyono, 2015: 6) (Pertiwi, 2022). Jenis penelitian ini adalah studi kasus. Data dikumpulkan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Teknik analisis data penelitian ini adalah dengan menggunakan proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara berulang dan interaktif. Model ini membantu peneliti menemukan pola, tema, serta makna yang muncul dari data lapangan. (Sugiyono 2019). Kemudian menguji keabsahannya dengan sumber di lapangan dan metode, maupun diskusi. Kesimpulan diinterpretasikan dari verifikasi yang disesuaikan dengan data dan kajian yang diperoleh selama penelitian.

HASIL DAN DISKUSI

Pengembangan pariwisata desa merupakan salah satu strategi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, terutama di wilayah dengan potensi alam dan budaya yang kaya namun belum terkelola secara optimal. Wawancara dengan perangkat desa menjadi pintu masuk untuk memahami arah kebijakan, kapasitas kelembagaan, serta kendala yang sedang dihadapi pemerintah desa dalam proses membangun sektor ini. Melalui dialog langsung, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih autentik mengenai bagaimana desa memaknai potensi pariwisatanya serta sejauh mana komitmen pemerintah desa dalam merumuskan program-program pengembangan.

Dalam membuat kebijakan dalam pengembangan pariwisata pemerintah desa harus memiliki visi misi khusus terkait dengan pengembangan pariwisata. Namun visi misi terkait pengembangan pariwisata di desa kurangi dalang belum benar-benar di rancang oleh pemerintah desa yang Dimana di sampaikan secara langsung oleh ibu ica yang merupakan staf desa di desa kurangi dalang.

Dalam penelitian yang di lakukan dengan ibu Ica selaku staf desa beliau memberikan informasi dasar mengenai posisi pemerintah desa terhadap isu pariwisata “desa belum memiliki visi misi khusus terkait pariwisata”. Lebih lanjut ibu ica menjelaskan “Meskipun desa belum memiliki visi dan misi khusus terkait pengembangan pariwisata, informasi tersebut justru menjadi penting sebagai indikator tahap perkembangan perencanaan desa”.

Hal senada juga di benarkan oleh bapak zuraidin selaku korl perencanaan beliau mengatakan bahwa “pemerintah desa belum memiliki visi dan misi khusus yang diarahkan untuk pengembangan pariwisata. Ketiadaan visi sektoral ini dapat diinterpretasikan bahwa desa masih berada pada tahap generalisasi arah pembangunan, sehingga sektor pariwisata belum menjadi prioritas utama dalam dokumen perencanaan jangka menengah maupun jangka pendek”.

Berdasarkan keterangan Ibu Ica dan Bapak Zuraidin, dari analisis peneliti bahwa ketiadaan visi dan misi khusus terkait pengembangan pariwisata bukan sekadar kelemahan perencanaan, melainkan mencerminkan posisi desa yang masih berada pada tahap generalisasi arah pembangunan. Pada tahap ini, pemerintah desa masih memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar dan pembangunan yang bersifat umum, sehingga sektor pariwisata belum diposisikan sebagai agenda strategis dalam dokumen perencanaan jangka menengah maupun jangka pendek. Kondisi ini menunjukkan bahwa pariwisata masih dipandang sebagai potensi yang belum sepenuhnya matang untuk diformalkan ke dalam kebijakan sektoral.

Lebih lanjut, belum adanya visi dan misi pariwisata berdampak pada lemahnya arah kebijakan dan kesiapan kelembagaan desa dalam mengelola sektor tersebut. Tanpa kerangka visi yang jelas, program pariwisata cenderung bersifat sporadis, reaktif, dan belum terintegrasi secara sistematis. Hal ini juga mengindikasikan bahwa proses agenda-setting pariwisata belum terbentuk secara formal, sehingga pengembangan pariwisata masih menunggu kesiapan perencanaan, pembiayaan, dan penguatan kelembagaan. Dengan demikian, perumusan visi dan misi khusus pariwisata menjadi langkah strategis yang penting agar potensi wisata desa dapat dikelola secara terarah, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dalam proses pengembangan pariwisata di butuhkan infrastruktur yang memadai agar proses pengembangan pariwisata di desa kurangi dalang ini berkembang dan pemerintah desa

membutuhkan dana untuk Pembangunan infrastruktur agar berjalan dengan lancar. Maka dari itu pemerintah desa membutuhkan dana dukungan dari pemerintah kecamatan dan kabupaten untuk keberlangsungan proses perbaikan infrastruktur di desa Kuranji Dalang.

Dalam pernyataan yang disampaikan oleh bapak Zuraidin beliau mengatakan bahwa “pemerintah desa menempatkan pembangunan infrastruktur dasar dan penguatan sektor pariwisata sebagai bagian dari agenda strategis yang diupayakan secara bertahap melalui dokumen perencanaan resmi desa, yakni RPJMDes dan RKPDes. Penyusunan RPJMDes dalam rentang delapan tahun menunjukkan adanya orientasi pembangunan jangka panjang yang terarah, sekaligus mencerminkan kepatuhan desa terhadap mekanisme perencanaan pembangunan sebagaimana diatur dalam regulasi. Proses penyusunan RKPDes yang melibatkan tahapan Musdus, Musrenbang Desa, hingga Rapat Desa menggambarkan upaya untuk mengintegrasikan prinsip partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Namun demikian, tingkat efektivitas partisipasi tersebut masih sangat ditentukan oleh kehadiran dan keterlibatan aktif warga, yang pada praktiknya seringkali menjadi kendala”. Dan dalam hal yang sama juga disampaikan oleh bapak Zuraidin bahwa “yang menjadi penghambat pembangunan infrastruktur juga adalah karena kekurangan dana sehingga pemerintah desa belum benar-benar bisa mengatasi masalah terkait dengan infrastruktur jalan yang ada di desa Kuranji Dalang”.

Berdasarkan pernyataan Bapak Zuraidin, peneliti melihat, bahwa pemerintah Desa Kuranji Dalang telah memiliki kerangka perencanaan pembangunan yang relatif tertata dan patuh terhadap regulasi, sebagaimana tercermin dalam penyusunan RPJMDes dan RKPDes. Penempatan pembangunan infrastruktur dasar dan penguatan sektor pariwisata sebagai agenda strategis menunjukkan adanya orientasi pembangunan jangka panjang yang realistis dan bertahap. RPJMDes berfungsi sebagai arah kebijakan makro desa, sementara RKPDes menjadi instrumen operasional tahunan yang menjabarkan prioritas pembangunan. Keterlibatan forum Musdus, Musrenbang Desa, dan Rapat Desa mengindikasikan adanya upaya institusional untuk menerapkan prinsip partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Namun, partisipasi tersebut masih bersifat prosedural dan belum sepenuhnya substansial, karena efektivitasnya sangat bergantung pada kehadiran dan keterlibatan aktif warga yang dalam praktiknya masih rendah.

Lebih lanjut, keterbatasan pendanaan menjadi faktor penghambat utama dalam implementasi pembangunan infrastruktur, khususnya perbaikan dan peningkatan kualitas jalan desa. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, di mana dokumen perencanaan telah tersusun dengan baik tetapi kapasitas fiskal desa belum memadai untuk merealisasikan seluruh program secara optimal. Ketergantungan pada Dana Desa yang harus dibagi ke berbagai pos wajib menyebabkan pembangunan infrastruktur hanya dapat dilakukan secara parsial dan bertahap. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tantangan utama pemerintah desa bukan terletak pada absennya perencanaan, melainkan pada keterbatasan sumber daya keuangan dan efektivitas partisipasi masyarakat, yang keduanya sangat menentukan keberhasilan pembangunan infrastruktur dan pengembangan pariwisata desa secara berkelanjutan. Dalam konteks kebijakan publik, menjelaskan bahwa kebijakan pembangunan yang efektif harus didukung oleh perencanaan yang jelas, koordinasi antaraktor, serta ketersediaan sumber daya yang memadai. Hal ini relevan dengan pengembangan pariwisata desa, di mana lemahnya kebijakan sektoral, keterbatasan anggaran, dan kapasitas kelembagaan sering menjadi penghambat utama dalam implementasi program pariwisata. (Winarno 2012)

Berbagai macam proses pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa ada kendala yang dihadapi dalam proses pengembangan pariwisata terletak pada dua aspek utama, yang di paparkan oleh bapak Zuraidin yaitu “koordinasi dan pendanaan serta Kurangnya kehadiran masyarakat dalam musyawarah desa sehingga forum-forum deliberatif belum sepenuhnya efektif sebagai ruang komunikasi dua arah antara pemerintah desa dan warga. Di sisi lain, keterbatasan pendanaan termasuk pengurangan anggaran dan pembagian Dana Desa ke berbagai pos wajib menghambat penyelesaian program secara optimal. Kasus pelebaran jalan yang hanya dapat direalisasikan separuh merupakan contoh nyata bagaimana keterbatasan anggaran berpengaruh langsung terhadap implementasi program prioritas”.

Dari Pernyataan yang di sampaikan oleh bapak zuraidin peneliti melihat bahwa kendala utama dalam pelaksanaan pembangunan desa terletak pada dua aspek yang saling berkaitan, yaitu koordinasi dan pendanaan. Kurangnya kehadiran masyarakat dalam musyawarah desa menyebabkan forum-forum deliberatif belum berfungsi secara optimal sebagai ruang komunikasi dua arah antara pemerintah desa dan warga. Kondisi ini mengindikasikan bahwa partisipasi masyarakat masih bersifat formalitas, sehingga aspirasi, kebutuhan, dan masukan warga belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam proses pengambilan keputusan. Akibatnya, koordinasi antara pemerintah desa dan masyarakat menjadi lemah, yang berdampak pada rendahnya rasa memiliki (*sense of ownership*) masyarakat terhadap program pembangunan yang dijalankan.

Di sisi lain, keterbatasan pendanaan menjadi faktor struktural yang secara langsung memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Pengurangan anggaran serta pembagian Dana Desa ke berbagai pos wajib menyebabkan pemerintah desa harus melakukan prioritas ketat, sehingga tidak semua program dapat direalisasikan secara utuh. Kasus pelebaran jalan yang hanya dapat dilaksanakan separuh menjadi bukti konkret adanya kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun program telah ditetapkan sebagai prioritas, keterbatasan kapasitas fiskal desa tetap menjadi hambatan utama, sehingga pembangunan infrastruktur dan program strategis lainnya harus dilakukan secara bertahap dan sering kali belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.

Dalam rencana jangka panjang yang tetap mengacu pada RPJMDes bapak zuraidin juga mengatakan bahwa “desa memiliki arah strategis yang konsisten, meskipun implementasinya belum maksimal. Prioritas pembangunan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan peningkatan aksesibilitas menuju lokasi wisata menjadi strategi awal yang realistis dalam konteks keterbatasan sumber daya.” Secara keseluruhan, hasil wawancara ini menggambarkan bahwa pemerintah desa berada dalam proses transisi dari pembangunan infrastruktur dasar menuju pengembangan sektor pariwisata yang lebih terstruktur. Keberhasilan proses ini sangat dipengaruhi oleh kesiapan kelembagaan, efektivitas koordinasi masyarakat, serta kapasitas fiskal desa.

Berdasarkan pernyataan Bapak Zuraidin, dapat disimpulkan bahwa Desa Kuranji Dalang telah memiliki arah pembangunan jangka panjang yang relatif konsisten dengan mengacu pada RPJMDes, meskipun tingkat implementasinya belum sepenuhnya optimal. Prioritas pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat serta peningkatan aksesibilitas menuju lokasi wisata menunjukkan pilihan strategi yang realistis dan rasional dalam kondisi keterbatasan sumber daya. Pendekatan ini mencerminkan pemahaman pemerintah desa bahwa pengembangan pariwisata tidak dapat dilakukan secara instan, melainkan harus diawali dengan penguatan fondasi berupa infrastruktur dasar dan akses yang memadai sebagai prasyarat utama bagi berkembangnya aktivitas pariwisata.

Secara keseluruhan, temuan wawancara ini menggambarkan bahwa pemerintah desa tengah berada dalam fase transisi dari pola pembangunan yang berorientasi pada infrastruktur dasar menuju pengembangan sektor pariwisata yang lebih terstruktur dan terencana. Keberhasilan transisi tersebut sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan desa dalam mengelola sektor pariwisata, efektivitas koordinasi dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, serta kapasitas fiskal desa dalam mendukung implementasi program prioritas. Tanpa penguatan pada ketiga aspek tersebut, arah strategis yang telah dirumuskan berpotensi sulit diwujudkan secara optimal, meskipun secara konseptual telah berada pada jalur pembangunan yang tepat.

Dalam wawancara mengenai potensi dan dampak wisata Pantai Desa Kuranji bapak zuraidin mengungkapkan bahwa “dengan adanya sektor pembangunan yang di rencanakan oleh pemerintah desa yang dimana memiliki peran strategis dalam memberikan nilai ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Potensi pertama yang terlihat adalah keberlimpahan hasil laut, yang menjadi dampak positif dari adanya hasil laut yang mendukung mata pencaharian nelayan yang juga membuka peluang ekonomi lain seperti penjualan makanan dan minuman oleh masyarakat

setempat. Kehadiran wisatawan pada hari libur menandakan adanya daya tarik wisata yang mulai dikenal”.

Berdasarkan pernyataan Bapak Zuraidin, peneliti menganalisis bahwa potensi wisata Pantai Desa Kuranji Dalang memiliki nilai strategis baik dari aspek ekonomi maupun sosial bagi masyarakat desa. Keberlimpahan hasil laut tidak hanya berfungsi sebagai sumber mata pencaharian utama bagi nelayan, tetapi juga menjadi modal ekonomi yang dapat dikembangkan dalam konteks pariwisata, seperti usaha kuliner berbasis hasil laut dan penjualan makanan serta minuman oleh masyarakat setempat. Kondisi ini menunjukkan adanya keterkaitan antara sektor pariwisata dan sektor ekonomi lokal, di mana aktivitas wisata mampu menciptakan peluang usaha baru dan memperluas sumber pendapatan masyarakat.

Selain itu, kehadiran wisatawan terutama pada hari libur menandakan bahwa pantai tersebut telah memiliki daya tarik awal dan mulai dikenal oleh masyarakat luas. Hal ini mengindikasikan bahwa Desa Kuranji Dalang memiliki potensi pasar wisata yang dapat terus dikembangkan apabila didukung oleh pengelolaan yang lebih terstruktur, promosi yang tepat, serta penyediaan fasilitas dasar yang memadai. Dengan demikian, sektor pariwisata pantai tidak hanya berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga berperan sebagai penggerak awal (trigger) bagi pembangunan ekonomi desa secara berkelanjutan apabila dikelola secara terencana dan berbasis kebutuhan lokal. Hal ini sejalan dengan teori pengembangan pariwisata berbasis lokal, yang menyatakan bahwa potensi alam dapat menjadi penggerak utama ekonomi desa apabila dikelola dengan baik. Selain itu, pantai ini memiliki nilai rekreasi yang terjangkau dan menjadi kebanggaan bagi masyarakat serta perangkat desa, menunjukkan adanya keterikatan emosional dan sosial terhadap keberadaan destinasi wisata tersebut. (UNWTO 2018),

Begitu pun juga dari sisi dampak negatif, yang dimana bapak zuraidin menyoroti dua persoalan utama yaitu “perilaku pengunjung dan kondisi alam serta Kedatangan remaja atau pengunjung di waktu larut malam menunjukkan adanya tantangan sosial yang perlu diantisipasi melalui kebijakan pengawasan atau regulasi jam kunjung. Sementara itu, faktor gelombang tinggi atau air pasang menjadi ancaman keselamatan bagi anak-anak dan pengunjung dewasa”.

Dari sisi dampak negatif, pernyataan Bapak Zuraidin menunjukkan bahwa pengembangan wisata Pantai Desa Kuranji Dalang juga dihadapkan pada tantangan sosial dan lingkungan yang perlu mendapat perhatian serius. Perilaku pengunjung, khususnya kedatangan remaja atau wisatawan pada waktu larut malam, mengindikasikan adanya potensi gangguan ketertiban dan keamanan sosial di lingkungan desa. Kondisi ini menuntut adanya kebijakan pengawasan yang lebih jelas, seperti pengaturan jam kunjung, peningkatan peran aparat desa, serta keterlibatan masyarakat dalam menjaga ketertiban kawasan wisata agar aktivitas pariwisata tidak menimbulkan dampak sosial yang merugikan.

Selain persoalan sosial, faktor alam seperti gelombang tinggi dan air pasang juga menjadi ancaman nyata bagi keselamatan pengunjung, baik anak-anak maupun orang dewasa. Hal ini menunjukkan bahwa kesiapan pengelolaan wisata dari aspek keselamatan masih perlu ditingkatkan melalui penyediaan rambu peringatan, penetapan zona aman, serta edukasi kepada pengunjung mengenai risiko alam. Dengan demikian, meskipun potensi wisata pantai cukup besar, pengembangannya harus diimbangi dengan upaya mitigasi risiko dan regulasi yang memadai agar pariwisata dapat berkembang secara aman, tertib, dan berkelanjutan bagi masyarakat Desa Kuranji Dalang. Dalam konteks manajemen risiko pariwisata, kondisi ini menegaskan pentingnya penyediaan informasi keselamatan, zona aman, serta pengawasan di area rawan. Kedua dampak negatif ini menunjukkan bahwa meskipun potensi pariwisata cukup kuat, kesiapan pengelolaan dan mitigasi risiko masih perlu ditingkatkan.

Dalam upaya menjaga kelestarian budaya lokal juga menjadi perhatian dalam hasil wawancaradenga bapak zuraidin beliau mengatakan bahwa. “Masyarakat harus menekankan pentingnya menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan sebagai cara mempertahankan nilai budaya dan etika lokal di sekitar area wisata”. Tiga aspek ini sejalan dengan prinsip sustainable tourism, yang menekankan perlunya menjaga lingkungan fisik, sosial, dan budaya agar pariwisata tidak menimbulkan degradasi terhadap identitas lokal. Sikap masyarakat yang mendukung

kelestarian budaya menunjukkan adanya kesadaran kolektif terhadap pentingnya melindungi identitas desa dari potensi dampak negatif pariwisata.

pernyataan Bapak Zuraidin menunjukkan bahwa upaya menjaga kelestarian budaya lokal menjadi bagian penting dalam pengembangan pariwisata di Desa Kuranji Dalang. Penekanan pada kebersihan, ketertiban, dan keamanan mencerminkan kesadaran bahwa nilai budaya dan etika lokal tidak hanya diwujudkan melalui tradisi atau simbol budaya semata, tetapi juga melalui perilaku sehari-hari masyarakat dan pengunjung di kawasan wisata. Ketiga aspek tersebut berfungsi sebagai norma sosial yang menjaga keharmonisan antara aktivitas pariwisata dan kehidupan masyarakat lokal.

Dari analisis peneliti, pandangan ini menunjukkan bahwa masyarakat dan pemerintah desa mulai memahami prinsip pariwisata berkelanjutan, di mana pelestarian budaya dan lingkungan menjadi prasyarat utama bagi keberlanjutan destinasi wisata. Dengan menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan, desa tidak hanya melindungi identitas dan nilai lokal dari dampak negatif pariwisata, tetapi juga meningkatkan kualitas pengalaman wisatawan. Hal ini memperkuat posisi masyarakat sebagai aktor utama dalam pengelolaan pariwisata, sekaligus memastikan bahwa pengembangan wisata berjalan sejalan dengan nilai-nilai sosial dan budaya yang telah mengakar di Desa Kuranji Dalang.

Sehingga secara keseluruhan, hasil wawancara dengan pemerintah desa menunjukkan bahwa Pantai Desa Kuranji Dalang memiliki potensi pariwisata yang signifikan dan memberi manfaat ekonomi nyata bagi masyarakat. Namun, pengembangan pariwisata perlu diimbangi dengan penguatan regulasi sosial, peningkatan keselamatan, dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Dukungan pemerintah desa, partisipasi aktif masyarakat, dan perumusan kebijakan berbasis kebutuhan lokal menjadi kunci dalam mewujudkan pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan di Desa Kuranji Dalang.

Selain wawancara dengan pemerintah desa, peneliti juga menggali pandangan dari masyarakat setempat untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai potensi dan dampak wisata Pantai Kuranji Dalang. Salah satu informan yang memberikan pandangan tersebut adalah Ibu Ima, atau yang dikenal dengan sapaan Mama Merdeka, seorang warga yang berprofesi sebagai petani. Melalui wawancara ini, peneliti berupaya menangkap persepsi masyarakat akar rumput terkait manfaat maupun tantangan yang muncul seiring berkembangnya aktivitas wisata di kawasan pantai tersebut.

Dalam wawancara yang dilakukan dengan ibu ima (mama merdeka) yang merupakan salah satu warga desa kuranji dalang yang bekerja sebagai seorang petani beliau Menjelaskan “potensi dari kegiatan wisata dapat menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positif yaitu di pantai kuranji dalang dapat menghasilkan banyak ikan dan wisata pantainya di datangi para wisatawan yang sedang menikmati hari liburnya. Destinasi wisata nya pun dapat menghasilkan pendapatan bagi masyarakat contohnya seperti menjual nasi, minuman dan lain-lain. Tempatnya pun terjangkau untuk rekreasi masyarakat sekitar. Sehingga dengan adanya para wisatawan yang datang menjadi kebanggaan tersendiri bagi pemerintah desa dan masyarakat di desa kuranji dalang. Dalam melakukan kegiatan wisata ada dampak negatif yang dimana para remaja atau pengunjung datang tidak tepat waktu (larut malam). Gelombang pantai (air pasang) mengganggu anak-anak kecil dan orang dewasa”.

Dalam penelitian ini peneliti menganalisis terkait wawancara dengan Ibu Ima yang memberikan gambaran mengenai bagaimana masyarakat memahami potensi dan dampak pengembangan pariwisata di Desa Kuranji Dalang. Pernyataan Ibu Ima mengonfirmasi bahwa Desa Kuranji Dalang memiliki potensi wisata yang kuat secara ekonomi, namun menghadapi hambatan dalam aspek sosial dan keselamatan. Potensi tersebut dapat berkembang menjadi destinasi wisata berkelanjutan apabila didukung oleh pengelolaan yang lebih terstruktur, peningkatan kapasitas masyarakat, dan kebijakan desa yang memperhatikan regulasi sosial serta mitigasi risiko.

Dalam kebijakan dan pengelolaan pemerintah desa masyarakat sangat mendukung kebijakan pariwisata, ibu ima mengatakan bahwa “pemerintah desa bertanggung jawab dan transparan dalam pengelolaan. Dan cara menjaga budaya lokal dan destinasi wisata dalam

pariwisata agar tetap lestari di desa Kuranji Dalang ini adalah dengan cara menjaga kebersihan, jaga ketertiban, serta jaga keamanan”.

Dari analisis peneliti dari Pernyataan Ibu Ima bahwa pemerintah desa bertanggung jawab dan transparan dalam pengelolaan pariwisata menunjukkan adanya tingkat kepercayaan masyarakat yang cukup tinggi terhadap kinerja pemerintah desa. Transparansi dan tanggung jawab tersebut menjadi indikator penting dari tata kelola pemerintahan desa yang baik, karena masyarakat merasa dilibatkan dan mengetahui arah serta proses pengelolaan pariwisata di desanya. Kepercayaan ini merupakan modal sosial yang sangat berharga dalam mendukung keberhasilan program pengembangan pariwisata, sebab tanpa dukungan dan kepercayaan masyarakat, kebijakan yang dijalankan berpotensi mengalami penolakan atau tidak berkelanjutan.

Lebih lanjut, pandangan Ibu Ima mengenai upaya menjaga kelestarian budaya lokal dan destinasi wisata melalui kebersihan, ketertiban, dan keamanan menunjukkan bahwa masyarakat memahami perannya sebagai aktor utama dalam menjaga keberlanjutan pariwisata. Ketiga aspek tersebut tidak hanya berfungsi sebagai upaya pelestarian lingkungan dan budaya, tetapi juga sebagai cerminan nilai dan etika lokal yang harus dijaga di tengah meningkatnya aktivitas wisata. Dengan demikian, kombinasi antara tata kelola pemerintah desa yang transparan dan kesadaran masyarakat terhadap pelestarian budaya menjadi fondasi penting bagi pengembangan pariwisata Desa Kuranji Dalang yang inklusif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan pembahasan dan hasil wawancara dengan perangkat desa, tokoh masyarakat, serta warga Desa Kuranji Dalang, dapat disimpulkan bahwa pengembangan pariwisata desa merupakan proses yang kompleks dan tidak hanya bergantung pada ketersediaan potensi alam semata, tetapi juga sangat ditentukan oleh kesiapan perencanaan, kelembagaan, kebijakan, serta partisipasi masyarakat. Desa Kuranji Dalang memiliki potensi pariwisata bahari yang cukup besar melalui kawasan pantainya, yang telah memberikan manfaat ekonomi awal bagi masyarakat, khususnya melalui aktivitas perikanan dan usaha kecil seperti penjualan makanan dan minuman kepada wisatawan.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa hingga saat ini belum memiliki visi dan misi khusus yang secara eksplisit diarahkan pada pengembangan sektor pariwisata. Kondisi ini menandakan bahwa pariwisata belum menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan desa, sehingga kebijakan yang ada masih bersifat umum, sporadis, dan belum terarah secara sektoral. Ketiadaan visi tersebut berdampak pada lambatnya pembentukan kelembagaan pariwisata yang kuat serta belum optimalnya pemanfaatan potensi wisata yang dimiliki desa.

Di sisi lain, pemerintah desa telah menunjukkan upaya perencanaan yang cukup baik melalui penyusunan dokumen resmi seperti RPJMDes dan RKPDes, yang menjadi dasar pembangunan jangka panjang dan tahunan. Prioritas pada pembangunan infrastruktur dasar, keamanan, dan kenyamanan mencerminkan bahwa pengembangan pariwisata masih berada pada tahap fondasi. Pendekatan yang mulai diarahkan pada pembentukan kelompok masyarakat seperti Pokdarwis dan UMKM menunjukkan adopsi awal konsep pariwisata berbasis masyarakat (community-based tourism), meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala.

Kendala utama dalam pengembangan pariwisata Desa Kuranji Dalang terletak pada keterbatasan pendanaan, koordinasi, serta rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam forum-forum musyawarah desa. Keterbatasan anggaran desa menyebabkan beberapa program infrastruktur tidak dapat direalisasikan secara optimal, sementara minimnya kehadiran masyarakat dalam musyawarah menghambat efektivitas proses pengambilan keputusan secara partisipatif. Meski demikian, masyarakat menunjukkan tingkat kepercayaan yang cukup tinggi terhadap pemerintah desa, yang merupakan modal sosial penting bagi keberhasilan pembangunan ke depan.

Dari perspektif sosial dan lingkungan, pengembangan pariwisata juga menimbulkan tantangan berupa perilaku pengunjung yang kurang terkendali serta risiko keselamatan akibat

kondisi alam pantai. Hal ini menegaskan perlunya penguatan regulasi sosial, pengawasan, serta upaya mitigasi risiko agar pengembangan pariwisata tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan. Kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan menunjukkan adanya potensi besar untuk mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan apabila didukung oleh kebijakan dan pengelolaan yang lebih terstruktur.

Secara keseluruhan, pengembangan pariwisata di Desa Kuranji Dalang berada pada fase transisi dari pembangunan infrastruktur dasar menuju pengelolaan pariwisata yang lebih terarah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas pemerintah desa, perumusan visi dan misi pariwisata yang jelas, peningkatan partisipasi masyarakat, serta dukungan pendanaan dari pemerintah di tingkat yang lebih tinggi. Dengan langkah-langkah tersebut, pariwisata desa diharapkan dapat berkembang secara inklusif, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Kuranji Dalang secara nyata.

REFERENSI

- Adisasmita, R. (2006). *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hadiwijoyo, S. S. (2012). *Perencanaan Pariwisata Pedesaan Berbasis Masyarakat*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, I. (2018). *Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Putra, I. N. D. (2019). "Pengembangan Pariwisata Berbasis Potensi Lokal Desa." *Jurnal Kepariwisata Indonesia*, 13(1), 45–57.
- Marpaung, Grace. "Peningkatan kapabilitas green economy dalam pengembangan desa wisata sebagai upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan." *Kumawula* (2022).
- Suwantoro, Gamal. "Dasar-dasar pariwisata." (2019).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Yoeti, O. A. (2016). *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- UNWTO. (2018). *Tourism for Development*. Madrid: World Tourism Organization.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.
- Bertacchini, E., & Frontuto, V. (2024). Economic valuation of industrial heritage: A choice experiment on Shanghai Baosteel industrial site. *Journal of Cultural Heritage*, 66, 215–228. <https://doi.org/10.1016/j.culher.2023.11.016>
- Munif, I. R. S., & Mosik. (2009). Penerapan Metode Experiential Learning Pada Pembelajaran Ipa Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Fisika Indonesia*.
- Pertiwi, M. I. (2022). ANALISIS PENGARUH KINERJA KEBERLANJUTAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN SELAMA MASA PANDEMI COVID-19. *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*. <https://doi.org/10.22146/abis.v10i3.77562>
- SNKI, S. N. K. I. (2021). Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. *Siaran Pers No. HM.4.6/11/SET.M.EKON.2.3/01/2020*.
- Suntono. (2019). *PARIWISATA DAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT*. *Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat*, 11(1), 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Zitri, I. (2022). Collective Action Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dalam Percepatan Pariwisata Desa Labuan Kertasari untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*. <https://doi.org/10.47650/jglp.v4i1.436>